

PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Ali Hardana^{1*}, Jafar Nasution²

^{1,2} IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Padangsidimpuan, Indonesia

* Corresponding Author: alihardana@iain-padangsidimpuan.ac.id

ABSTRACT

Purpose - Local governments with great authority in the current era of autonomy must be able to use the allocation to the maximum for the welfare of the community. The appropriate local government fiscal policy through the Regional Revenue and Spending Budget (APBD) is expected to increase the human development index to improve the welfare of the community. This research was conducted to find out how much influence the local government financial ratios have on the human development index, the ratio used is the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of regional financial independence, the ratio of the effectiveness of local own revenue and the ratio of the effectiveness of the local tax.

Research Method - The type of data from this research is quantitative descriptive using primary and secondary data. The data analysis technique used is multiple linear regressions.

Findings - The results of this research are that there is a very strong relationship between the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependency, the ratio of regional financial independence, the ratio of the effectiveness of local own-source revenue, and the ratio of the effectiveness of local taxes and simultaneously affect the human development index.

Implication – There is a very strong relationship between the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of regional financial independence, the effectiveness ratio of regional original income and the effectiveness of regional taxes and have a simultaneous (together) effect on the human development index.

Keywords: Financial Ratios, Human Development Index, APBD, Finance

JEL code: G3, G32,

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu Negara. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Kecukupan dalam hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan dan keamanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupannya (Baeti, 2013).

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (Setiawan, 2013). Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan

tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2013).

Dalam Katalog BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa IPM digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Anggraini & Sutaryo, 2015).

Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia (BPS, 2013).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan

Rincian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,42	73,81	75,06	75,22	75,48
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	68,37	68,73	69,15	69,41	69,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,50	14,51	14,53	14,54	14,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,56	10,63	10,70	11,00	11,09
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)	9 668	10 464	10 795	11 181	10 856

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan (2022)

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di pemerintah Kota Padang sidimpuan naik setiap tahunnya. Namun, permasalahan pemerintah Kota Padangsidimpuan saat ini yaitu terkait tentang masalah pertumbuhan ekonomi yang masih negatif dikarenakan menurunnya harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi yang negatif artinya masih banyak masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (Riau *Green*, 2018).

Pemerintah daerah dengan kewenangannya yang besar di era otonomi saat ini harus mampu mendayagunakan alokasi untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012).

Kriteria dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik di sebuah pemerintah dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan.

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita juga mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin besar juga pengeluarannya (Sasana, 2012).

Pembangunan manusia yang dinilai baik dapat diukur dengan alat penilaian kinerja keuangan suatu pemerintah yaitu dengan menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio yang sering digunakan dalam pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangannya baik atau tidak dapat dilihat dari rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah.

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dan rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Anggraini dan Sutaryo, 2015).

Hasil penelitian Sasana (2012) menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah pertama, memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/ Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua, pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian hasil penelitian Laisina *et al.* (2015) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah di Sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif.

Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia, rasio yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007). Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas- tugas yang harus dijalankan. Salah satu tugas utama pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Anggraini & Sutaryo, 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut. Laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditujukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut, dan menurut pasal 169 ayat (2g)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan (Halim, 2007).

Dalam kerangka konseptual paragraf 28 standar akuntansi pemerintahan menjelaskan komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan Perubahan SAL). (c) Neraca. (d) Laporan Operasional (LO). (e) Laporan Arus Kas (LAK). (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Khusus pada SKPD, dari 7 laporan keuangan wajib dalam peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, SKPD hanya menyusun laporan keuangan sebagai berikut: (a) Laporan realisasi anggaran (LRA). (b) Neraca. (c) Laporan operasional (LO). (d) Laporan perubahan ekuitas (LPE). (e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Sebagaimana diketahui laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas pemerintah. Untuk menganalisis laporan keuangan maka diperlukan penguasaan terhadap: (a) cara menyusun laporan keuangan (Proses akuntansi); (b) konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi; (c) teknis analisisnya; dan (d) segmen dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internal maupun nasional.

Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis rasio berguna bagi para analisis internal untuk membantu manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasil operasinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Dari laporan keuangan akan tergambar kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga memudahkan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 2008).

Indeks Pembangunan Manusia

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas manusianya. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP). Faktanya, masih kerap dijumpai Negara-Negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah (BPS, 2013).

Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. "Perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS, 2013).

Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*) (Anggraini & Sutaryo, 2015). Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia (BPS, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (Setiawan & Abdul, 2013).

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek kesehatan yang dicerminkan oleh Indikator Angka Harapan Hidup (AHH), aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), aspek terakhir yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan melalui indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian (BPS, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan yaitu instansi yang terkait yakni Badan Pusat Statistik sebagai instansi yang mendokumentasikan tentang indeks pembangunan manusia serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendokumentasikan tentang pendapatan daerah pada tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas dan identifikasi determinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>N</i>
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	71,4500	,80455	5
Rasio Derajat Desentralisasi (X1)	8,5000	1,02703	5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)	91,4800	1,01750	5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3)	9,3060	1,21880	5
Rasio Efektivitas Pendapatan asli Daerah (X4)	67,1720	19,45382	5
Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X5)	1,179888	42,37317	5

Sumber: *Output SPSS (2022)*

Indeks Pembangunan Manusia (Y), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 71,4500 dengan standar deviasi sebesar 0,80455. Nilai rata-rata 71,4500 menunjukkan besarnya indeks pembangunan manusia sebesar 71,4500. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Rasio Derajat Desentralisasi (X1), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8,5000 dengan standar deviasi sebesar 1,02703. Nilai rata-rata 8,5000 menunjukkan besarnya rasio derajat desentralisasi sebesar 8,5000. Nilai rata-rata dan nilai

standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 91,4800 dengan standar deviasi sebesar 1,01750. Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 91,4800. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,3060 dengan standar deviasi sebesar 1,21880. Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 9,3060. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X4), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 67,1720 dengan standar deviasi sebesar 19,45382. Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 67,1720. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X5), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,179888 dengan standar deviasi sebesar 42,37317. Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio efektivitas pajak daerah sebesar 1,179888. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang tidak baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Uji Normalitas Data

Hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dapat dijelaskan bahwa uji normalitas data untuk variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk variabel X1 nilai *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebesar 0,948, yang kedua untuk variabel X2 nilai *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebesar 0,959, yang ketiga untuk variabel X3 nilai *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebesar 0,954, yang keempat untuk variabel X4 nilai *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebesar 0,995, untuk variabel X5 nilai *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebesar 0,574 dan untuk variabel Y nilai *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebesar 0,997. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* untuk variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y dalam penelitian ini lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Identifikasi Determinan

Pengaruh rasio derajat desentralisasi (X1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X1 terhadap Y di dapat dari nilai R dari *model summary* yaitu sebesar 0,740, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rasio derajat desentralisasi terhadap indeks pembangunan manusia dengan besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai *R Square* adalah 0,548 atau 54,8% dan sisanya 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah (X2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X2 terhadap Y di dapat dari nilai R dari *model summary* yaitu sebesar 0,730, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai *R Square* adalah 0,533 atau 53,3% dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X3) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X3 terhadap Y di dapat dari nilai R dari *model summary* yaitu sebesar 0,738, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai *R Square* adalah 0,544 atau 54,4% dan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah (X4) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X4 terhadap Y di dapat dari nilai R dari *model summary* yaitu sebesar 0,870, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai *R Square* adalah 0,757 atau 75,7% dan sisanya 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh rasio efektivitas pajak daerah (X5) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X5 terhadap Y di dapat dari nilai R dari *model summary* yaitu sebesar 0,597, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rasio efektivitas pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia dan besar sumbangan yang diberikan dapat dilihat dari nilai *R square* adalah sebesar 0,356 atau 35,6% dan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh derajat desentralisasi (X1), rasio ketergantungan keuangan daerah (X2), rasio kemandirian keuangan daerah (X3), rasio efektivitas pendapatan asli daerah (X4) dan rasio efektivitas pajak daerah (X5) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y di dapat dari nilai R dari *model summary* yaitu sebesar 1,0, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah dan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap indeks pembangunan manusia dengan besar sumbangan pengaruh yang dapat dilihat dari nilai *adjusted R Square* adalah 0,999 atau 99,9%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Besar pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap indeks pembangunan manusia adalah 54,8%. Besar pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia adalah 53,3%. Besar pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia adalah 54,4%. Besar pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia adalah 75,7%. Besar pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia adalah sebesar 35,6%. Sedangkan besar pengaruh derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia secara simultan adalah 99,9%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvidsson, S. (2010). Communication of corporate social responsibility: A study of the views of management teams in large companies. *Journal of Business Ethics*, 96(3), 339–354. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0469-2>.
- Arvidsson, S. (2014). Corporate social responsibility and stock market actors: A comprehensive study. *Social Responsibility Journal*, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2012-0099>.
- Cheng, E. C. M., & Courtenay, S. M. (2004). Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure. *International Journal of Accounting*, 41(3), 262–289. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2006.07.003>.

- Flammer, C. (2013). Corporate social responsibility and shareholder reaction: the environmental awareness of investors. *Academy of Management Journal*, 56(3), 758–781.
- Amin, Nurul. 2015. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah”. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4 (1), 80-91.
- Anggraini, Tika dan Sutaryo. 2015. “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia”, *Jurnal SNA 18 Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan Ke-14*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astri, Meylina, Sri Indah Nikensari dan Harya Kuncara. 2013. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* 1(1).
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Padangsidempuan Dan Komponennya Tahun 2011-2016*. Diakses dari: <https://bengkaliskab.bps.go.id/statictable/2017/05/12/31/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-bengkalis-dan-komponennya-tahun-2011-2016.html>, tanggal 26 April 2018.
- Baeti, Nur. 2013. “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. *Economics Development Analysis Journal* 2 (3). <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Elisa. 2018. “Analisa Rasio Laporan Keuangan Pada PT. Jasa Sarana Citra Bestari Cabang Bengkulu Menurut Perspektif Islam”. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2 (1), 56-76.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hardana, Ali. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan.” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886>.
- Informasi Ahli. 2015. *Kerangka Berpikir Dalam Penelitian*. Diakses dari: <http://www.informasiahli.com/2015/07/pengertian-kerangka-berpikir-dalam-penelitian.html>, tanggal 06 Februari 2018.
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. *Pustaka*. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/pustaka>, Tanggal 08 Februari 2018.
- Kasmir. 2008. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laisina, Cliff Vecky, Masinambow dan Wendy Rompas. 2015. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(4).
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. Pengertian Menurut Para Ahli. 2018. *Pengertian Relevan*. Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-relevan/>, Tanggal 06 Februari 2018.
- Pratisto, Arif. 2004. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rahman. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Trimedia.
- Riau Green. 2018. *Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bengkalis Negatif Karena Menurunnya Harga Minyak Dunia*. Diakses dari: <http://riaugreen.com/view/Bengkalis/31775/--Pertumbuhan-Ekonomi-Kab--Bengkalis-Negatif-Karena-Menurunnya-Harga-Minyak-Dunia-.html#.Wt2wxTMxXIU>, tanggal 26 April 2018.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sarwono, Jonathan. 2015. *Rumus-rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sasana, Hadi. 2012. “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”, *Media Ekonomi dan Manajemen* 25(1).
- Setiawan, Mohammad Bhakti dan Abdul Hakim. 2013. “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia”. *Jurnal Economia* 9(1).
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2000. *Metode Statistika: Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Singgih, Santoso. 2000. *SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2010a. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- P Siregar, Syofian. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Cetakan Pertama.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”, (*JEP*) *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8(2), 357-366. <https://doi.org/10.22219/jep.v8i2.3610>.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Statistik untuk Penelitian, Cet. Ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono dan Agus Susanto. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel: Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD*, Bandung: Alfabeta.
- Trisaputra, Andry. 2013. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Akuntansi* 1(3).
- Ulum, Ihyaul. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widyatama, Andin. 2017. “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung)”. *Skripsi Universitas Lampung*.

Wikipedia. 2018. *Metodologi Penelitian*. Diakses dari:
https://id.wikipedia.org/wiki/metodologi_penelitian, Tanggal 07 Februari 2018.